

**ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI
FISKAL DAN DERAJAT KEMANDIRIAN
TERHADAP INFLASI REGIONAL DI 29
KABUPATEN JAWA TENGAH TAHUN 2011-
2016**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

RUTH THANIA PUTRI SIAHAAN
NIM. 12020113130135

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ruth Thania Putri Siahaan
Nomor Induk Mahasiswa : 12020113130135
Fakultas/Jurusan : FEB/IESP
Judul Usulan Skripsi : **ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI
FISKAL DERAJAT KEMANDIRIAN
TERHADAP INFLASI REGIONAL DI 29
KABUPATEN JAWA TENGAH TAHUN
2011-2016**
Dosen Pembimbing : Banatul Hayati, S.E., M.Si.

Semarang, 21 Desember 2018

Dosen Pembimbing,

(Banatul Hayati, S.E., M.Si.)
NIP : 19680316 199802 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ruth Thania Putri Siahaan
Nomor Induk Mahasiswa : 12020113130135
Fakultas / Departemen : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan
Derajat Kemandirian Terhadap Inflasi
Regional di 29 Kabupaten Jawa Tengah Tahun
2011-2016**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 03 Januari 2019.

Dosen Penguji :

1. Banatul Hayati, S.E., M.Si. (.....)
2. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D. (.....)
3. Nenik Woyanti, S.E., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ruth Thania Putri Siahaan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Derajat Kemandirian Terhadap Inflasi Regional di 29 Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2011-2016**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

(Ruth Thania Putri Siahaan)

NIM. 12020113130135

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dilihat dari rasio fiskal sisi penerimaan (DDF) dan sisi pengeluaran (DK). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di wilayah kabupaten Jawa Tengah menunjukkan perbedaan dalam rasio-rasio fiskal dari sisi penerimaan (DDF) dan dari sisi pengeluaran (DK).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh rasio fiskal sisi penerimaan (DDF) dan sisi pengeluaran (DK), investasi, jumlah angkatan kerja yang bekerja dan upah minimum kabupaten terhadap inflasi regional. Data yang digunakan yaitu data tahunan dari tahun 2011-2016 pada 29 kabupaten di Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan metode *fixed effect model*. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil penelitian menunjukkan rasio fiskal sisi pengeluaran (DK) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional. Selain itu ditemukan pengaruh positif terhadap inflasi regional dari variabel lain seperti jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap inflasi regional adalah upah minimum kabupaten.

Kata kunci: rasio fiskal sisi penerimaan, rasio fiskal sisi pengeluaran, inflasi regional, *fixed effect method* (FEM).

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy was realized in the form of fiscal decentralization. Fiscal decentralization in this study is seen from the ratio of fiscal revenue side (DDF) and expenditure side (DK). The implementation of fiscal decentralization in the district of Central Java shows differences in fiscal ratios from the revenue side (DDF) and from the expenditure side (DK).

This study aims to see how the ratio of fiscal revenue side (DDF) and expenditure side (DK), investment, the number of employed workforce and the district minimum wage affect the regional inflation. The data used are annual data from 2011-2016 in 29 districts in Central Java. Data analysis was done by the fixed effect method. The data in this study sourced from the Central Bureau of Statistics.

The result of this study show that the ratio of fiscal decentralization on the expenditure side (DK) had a positive and significant effect to regional inflation. Furthermore, another positive effect was found from another variables such as the number of employed workforce. While the other variable such as the district minimum wage show negatively effect to regional inflation.

Keywords: Fiscal Decentralization on the Revenue Side, Fiscal Decentralization on the Expenditure Side, Regional Inflation, fixed effect method (FEM).

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi TUHANlah yang menentukan arah langkahnya”

(Amsal 16:9)

“When life gets you down, do you wanna know what you’ve gotta do? Just keep swimming.”

(Dory, Finding Nemo)

“Apapun yang udah di doakan, jangan di khawatirkan.”

(Mami)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Papi dan Mami, adik-adik terkasih, Theo, Caca, dan Acel, serta orang-orang yang berada di sekeliling saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Derajat Kemandirian Terhadap Inflasi Regional di 29 Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2011-2016”. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program Sarjana, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M.S., selaku dosen wali yang telah mendukung penulis sejak awal kuliah hingga penulisan skripsi.
4. Ibu Banatul Hayati, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing atas perhatian, kesabaran, bimbingan, saran dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Kedua orang tua tersayang, Papi T. Siahaan dan Mami H. Munthe, atas kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti.
6. Adik-adik penulis, Theo Rizaldy, Thasya Rosa dan Rachel Thyffani atas doa dan dukungannya.
7. Indah Natalia, Riris Lastri, Mia Florensia, Esther Septiana dan Leoni Jesika yang selalu ada. Doa dan dukungan kalian sangat berarti. Terima kasih juga untuk Alm. Olivia Dani, yang selalu punya tempat khusus di hati.
8. Veronica Simanjuntak, Suryani Simanjuntak, Angel Marpaung, Herson Marpaung, Salmon Manurung dan Trinita Sirait yang sudah menjadi adik-adik yang baik dan manis bagi penulis.
9. Niko Manurung, Dona Simorangkir dan Inung Widyo. Terima kasih sudah mau membantu dan mengajari penulis selama ini. Tanpa kalian, penulis tidak akan mungkin sampai kepada titik ini.
10. Nina Fania, Sania Widytia dan Tania Margareth untuk penghiburan, dukungan, semangat dan doa hingga saat ini.
11. Bang Batara, Kak Evi dan Bang Carles yang selalu sabar, memberi masukan, bantuan dan semangat yang tiada henti.
12. Teman-teman “PTPBT” Bang Daryl, Bang Natan, Abel, Bang Donal, Bang Tepen, Bang Iko, Bang Daud Aruan, Bang Jery dan Bang Dedy, atas perhatian dan kebahagiaan yang diberikan selama ini.

13. Teman-teman IESP 2013 yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua pelajaran dan pengalaman, semoga kesuksesan selalu mengiringi kita.

14. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila dalam penulisan terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Semarang, 26 Desember 2018

Penulis,

Ruth Thania Putri Siahaan
NIM. 12020113130135

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1.4 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Inflasi.....	18
2.2 Penyebab Timbulnya Inflasi	23
2.3 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal	33
2.3.1 Komposisi Anggaran dan Belanja Daerah	34
2.3.2 Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
2.3.3 Teori Desentralisasi Fiskal	38
2.4 Desentralisasi Fiskal dan Inflasi.....	39
2.4.1 Desentralisasi Fiskal Sisi Penerimaan dan Inflasi	40
2.5 Hubungan Antara Investasi dan Inflasi.....	43
2.6 Hubungan Antara Angkatan Kerja dan Inflasi: <i>Phillips Curve</i>	44
2.7 Hubungan Antara Upah Terhadap Inflasi.....	45
2.8 Penelitian Terdahulu	47
2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis	50
2.10 Hipotesis.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	53
3.1.1 Variabel Penelitian	53
3.1.2 Definisi Operasional.....	53

3.1.2.1	Inflasi Regional.....	53
3.1.2.2	Rasio Fiskal	54
3.1.2.3	Variabel Investasi	55
3.1.2.4	Variabel Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja	55
3.1.2.5	Variabel UMK	55
3.2	Metode Penelitian.....	56
3.2.1	Jenis dan Sumber Data	56
3.2.2	Metode Pengumpulan Data	57
3.2.3	Metode Analisis Data	57
3.2.4	Model Empiris	58
3.2.5	Teknik Analisis Regresi Data Panel	60
3.2.6	Deteksi Pelanggaran Asumsi Klasik	62
3.2.6.1	Uji Normalitas	62
3.2.6.2	Uji Multikolinieritas	63
3.2.6.3	Uji Heteroskedastisitas	63
3.2.6.4	Uji Autokorelasi.....	64
3.2.7	Uji Statistik Analisis Regresi.....	64
3.2.7.1	<i>Goodness of Fit</i> (R^2)	64
3.2.7.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	65
3.2.7.3	Pengujian Secara Individual (Uji t)	66
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	68
4.1.1	Perkembangan Inflasi pada Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016	68
4.1.2	Perkembangan Rasio PAD terhadap TPD pada Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016	69
4.1.3	Perkembangan Rasio Total Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tiap Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016.....	71
4.1.4	Rasio PMTB dan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Tiap Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016.....	72
4.1.5	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016	73
4.1.6	Perkembangan Upah Minimum Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016	75
4.2	Hasil Estimasi Model Empiris	76
4.3	Deteksi Pelanggaran Asumsi Klasik	77
4.3.1	Deteksi Normalitas	77
4.3.2	Deteksi Heteroskedastisitas	78
4.3.3	Deteksi Multikolinearitas	79
4.3.4	Uji Autokorelasi	80
4.3.5	Statistik Inferensi	81
4.3.5.1	Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji f)	81
4.3.5.2	Uji Koefisien Regresi Individu (Uji t)	82
4.4	Interpretasi Hasil Estimasi.....	84

4.4.1 Analisis Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal dari Sisi Pemasukan (DDF) dan Rasio Desentralisasi Fiskal dari Sisi Pengeluaran (DK) Terhadap Inflasi Regional	84
4.4.2 Analisis Pengaruh Investasi, Jumlah Tenaga Kerja dan UMK Terhadap Inflasi Regional	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	51
Tabel 4.1 Inflasi menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)	69
Tabel 4.2 Rasio Fiskal dari Sisi Pendapatan tiap Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)	70
Tabel 4.3 Rasio Fiskal dari Sisi Pengeluaran tiap Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)	71
Tabel 4.4 Investasi Menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen).....	73
Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011- 2016 (jiwa)	74
Tabel 4.6 Upah Minimum Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (rupiah)	75
Tabel 4.7 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	77
Tabel 4.8 Hasil Deteksi Heteroskedastisitas	79
Tabel 4.9 Hasil Deteksi Multikolinearitas	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen).....	7
Grafik 1.2 Rata-Rata Derajat Kemandirian Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)	8
Grafik 1.3 Rata-Rata Inflasi Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)	9
Grafik 1.4 Rata-Rata Rasio Investasi Menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)	10
Grafik 1.5 Rata-Rata Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (jiwa)	12
Grafik 1.6 Rata-Rata Upah Minimum Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (rupiah).....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Demand Pull Inflation</i>	20
Gambar 2.2 <i>Cost Push Inflation</i>	22
Gambar 2.3 Inflasi dalam Pandangan Klasik dan Moneteris	26
Gambar 2.4 <i>Original Phillips Curve</i>	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Inflasi, Rasio Desentralisasi Fiskal sisi Pemasukan, Rasio Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran, Investasi, Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan UMK	91
Lampiran B : Estimasi Model Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	99
Lampiran C : Deteksi Normalitas	100
Lampiran D : Deteksi Heteroskedastisitas	100
Lampiran E : Hasil <i>Cross-section Effect</i>	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan demokrasi dan pemberdayaan daerah menjadi sangat kuat dengan dikeluarkannya UU yang mengatur pelaksanaan Otonomi Daerah. Sejak terjadinya reformasi tahun 1998, upaya otonomi daerah terus menerus ditegakkan. Berakhirnya kekuasaan orde baru mendorong upaya otonomi daerah segera dilakukan. Munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menandakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kemudian, UU No. 22 tahun 1999 dan 25 tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk desentralisasi. Menurut UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, menurut Sidik (2002) konsep desentralisasi

terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*); desentralisasi administratif (*administrative decentralization*); desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*); dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*).

Salah satu desentralisasi yang paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menurut Sidik (2002), adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yang utamanya memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menurut Saragih (2003) dalam Aftrastya (2014), desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Teori desentralisasi fiskal tradisional memberikan pandangan yang menunjukkan bagaimana desentralisasi fiskal bisa meningkatkan fungsi sektor publik, melalui potensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien di sektor publik. Oates (2006) dalam Sumarsono, Hadi dan Utomo, Sugeng Hadi (2005) berpendapat bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial yang merespon perbedaan-perbedaan regional dan lokal mungkin akan lebih efektif dalam mempertinggi pembangunan ekonomi daripada kebijakan-kebijakan sentral yang bisa jadi mengabaikan perbedaan-perbedaan antar daerah tersebut. Argumen ini dapat dibenarkan sebab pemerintah kota/kabupaten mengetahui daerahnya lebih

baik daripada yang diketahui oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah daerah dipercaya bisa mengalokasikan dana kepada masing-masing sektor dalam ekonomi secara lebih efektif dan efisien daripada pemerintah pusat. Efektivitas dan efisiensi dampak bagi pembangunan tersebut tidak hanya karena masalah preferensi yang sesuai dengan keinginan konstituen/penduduk lokal, tetapi juga dikarenakan masalah skala ekonomi dari cakupan pengadaan barang publik tersebut bagi masing-masing daerah.

Kebijakan otonomi daerah mengharuskan daerah otonom untuk menerjemahkan kebijakan tersebut melalui pengeluaran dan pemasukan APBD yang mencerminkan aspek-aspek penganggaran dan pembelanjaan suatu daerah. Aspek pembelanjaan dalam APBD mencerminkan komponen-komponen kegiatan suatu daerah. Seberapa besar peranan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari kontribusi APBD terhadap besarnya PDRB suatu daerah.

Desentralisasi fiskal selain mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, juga dapat menyebabkan terjadinya instabilitas makroekonomi (inflasi) yang dapat dijelaskan menggunakan kurva permintaan agregat (*aggregate demand*). Mishkin (2008) dalam Rakanita (2012) menjelaskan bahwa hal pertama yang terjadi ketika *aggregate demand* naik yang disebabkan karena adanya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, adalah penurunan persediaan (*inventor*) dari pelaku-pelaku ekonomi yang tidak direncanakan. Apabila perekonomian sangat dekat dengan output potensialnya (ketika perekonomian berada pada bagian kurva

aggregate supply yang curam) maka perekonomian tidak dapat menaikkan output secara besar-besaran.

Bukti empiris yang menggambarkan hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi masih jarang dan tidak menyediakan kesimpulan yang pasti atas arah dan signifikansi hubungan. Fornasari, Webb, dan Zou (dalam Vasquez, 2001) yang dikutip dari Sumarsono, Hadi dan Utomo, Sugeng Hadi (2005) melihat keberadaan korespondensi satu-satu antara kenaikan defisit pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah, dan defisit pada periode berikutnya. Temuan ini nampaknya menyatakan bahwa jalur transmisi pada sistem desentralisasi bisa menyebabkan permasalahan stabilitas makroekonomi jika pembiayaan defisit lebih tinggi. Desentralisasi ekonomi berdampak positif terhadap output riil pasca reformasi di China, sebaliknya desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap stabilitas harga atau inflasi. Desentralisasi fiskal mempengaruhi inflasi di China melalui kewenangan penciptaan pendapatan oleh daerah menurut penelitian Felterstein dan Iwata (2005).

Desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan membuat kebijakan fiskal menjadi tanggung jawab yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa peneliti KPPOD (2004) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang terdesentralisasi lebih suka memperhatikan tujuan-tujuan daerah dalam pemanfaatan sumber dayanya, misalnya untuk meningkatkan PAD yang cenderung melakukan ekstensifikasi, retribusi dan pajak daerah. Retribusi dan pajak baru daerah merupakan hambatan besar bagi pengembangan usaha dan investasi di

daerah karena cenderung meningkatkan biaya produksi sehingga bersifat meningkatkan *cost push inflation*.

Desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran memungkinkan pemerintah daerah melakukan kebijakan defisit anggaran dan kebijakan utang yang dapat memicu terjadinya instabilitas makroekonomi daerah. Adanya kebebasan peminjaman oleh daerah otonom, memungkinkan pemerintah daerah memiliki kelebihan utang yang melampaui kapasitas pengembalian kewajibannya. Desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran sering tidak mengikutsertakan *seignorage* dan utang luar negeri dalam cakupan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga bisa meningkatkan inflasi daerah.

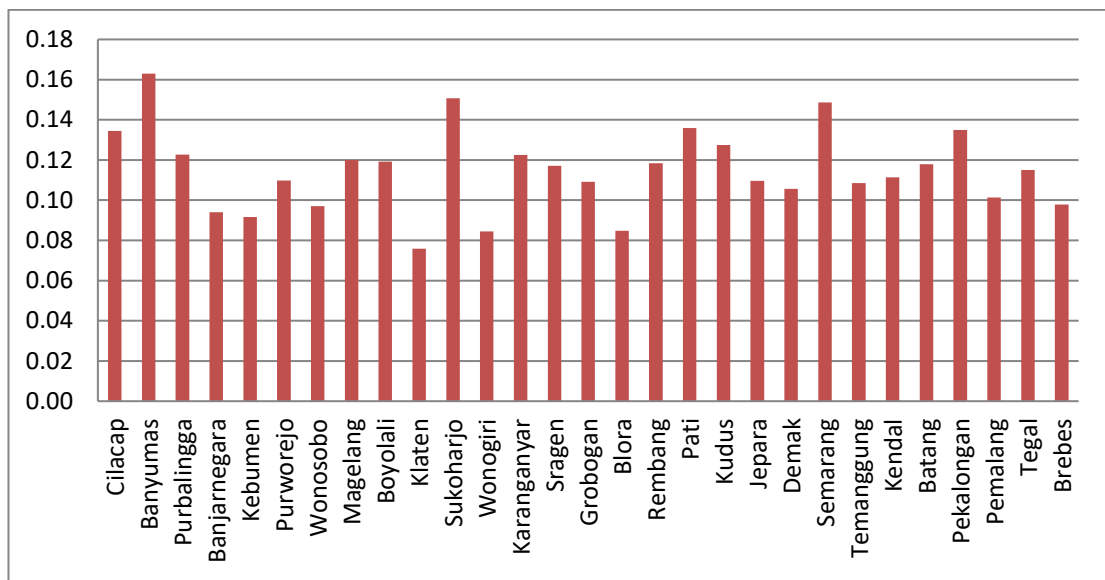
Di Indonesia sendiri, Ramdhani (2015) melakukan penelitian mengenai inflasi daerah dengan menggunakan analisis data panel melalui metode FEM (*fixed effect model*) dan REM (*random effect model*). Hasil estimasi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran mempunyai pengaruh untuk menurunkan inflasi regional. Sedangkan desentralisasi fiskal sisi penerimaan, keberadaan RITF (*Regional Inflation Task Force*) dan kondisi infrastruktur tidak memberikan dampak signifikan terhadap inflasi regional. Untuk variabel kontrol lainnya seperti PDRB, inflasi makanan dan populasi menunjukkan pengaruh yang positif untuk menaikkan inflasi regional.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelimpahan wewenang

ini relatif sama pada semua daerah di Indonesia, namun ada perbedaan di dalam derajat desentralisasi fiskal pada masing-masing daerah yang dicerminkan oleh besarnya rasio-rasio fiskal pada masing-masing daerah. Rasio-rasio fiskal tersebut meliputi derajat desentralisasi fiskal yang menggambarkan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan. Sedangkan, derajat kemandirian menggambarkan kemandirian atau kemampuan daerah membiayai pengeluarannya. Semakin tinggi kemandirian daerah, berarti tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Mahmudi (2010) mengatakan bahwa rasio fiskal sisi penerimaan yang kemudian disebut derajat desentralisasi fiskal pada penelitian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap TPD. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Seperti yang tergambar pada grafik 1.1, selama tahun 2011-2016 beberapa daerah seperti kabupaten Klaten, Wonogiri dan Blora memiliki nilai rata-rata terendah dalam derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan untuk daerah yang memiliki nilai tertinggi dalam melaksanakan derajat desentralisasi fiskal daerah pada kabupaten di Jawa tengah adalah kabupaten Banyumas.

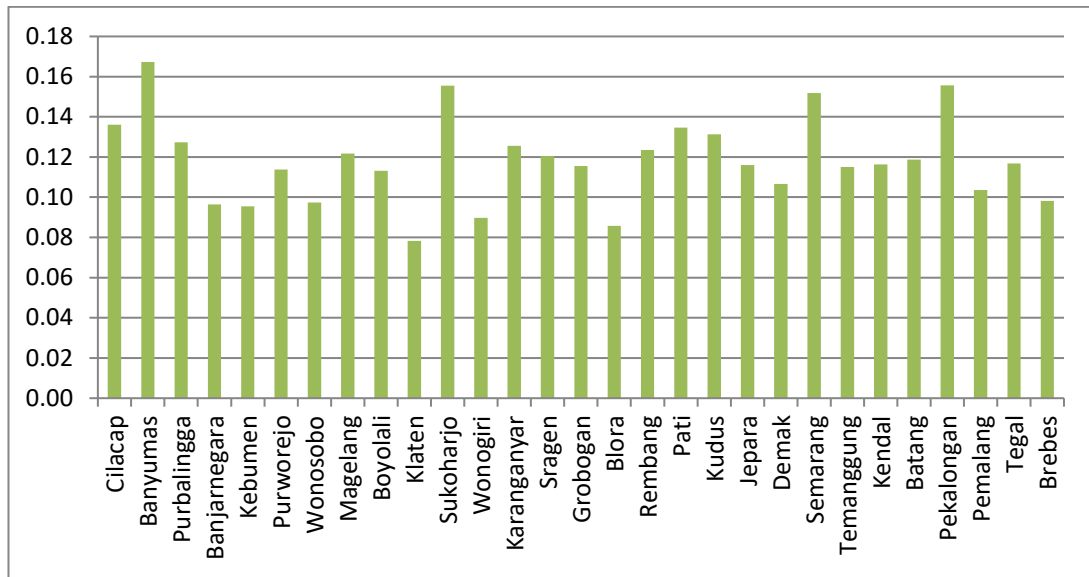
Grafik 1.1
Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)



Sumber: Berbagai Kabupaten dalam Angka (diolah)

Sedangkan untuk rasio fiskal sisi pengeluaran yang kemudian disebut derajat kemandirian dalam penelitian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja daerah. Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Apabila rasio ini menurun maka hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah cenderung menurun. Pada grafik 1.2, selama tahun 2011-2016 kabupaten Klaten memiliki nilai rata-rata terendah dalam derajat kemandirian pada kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan untuk daerah yang memiliki nilai tertinggi dalam melaksanakan derajat kemandirian pada kabupaten di Jawa tengah adalah kabupaten Banyumas.

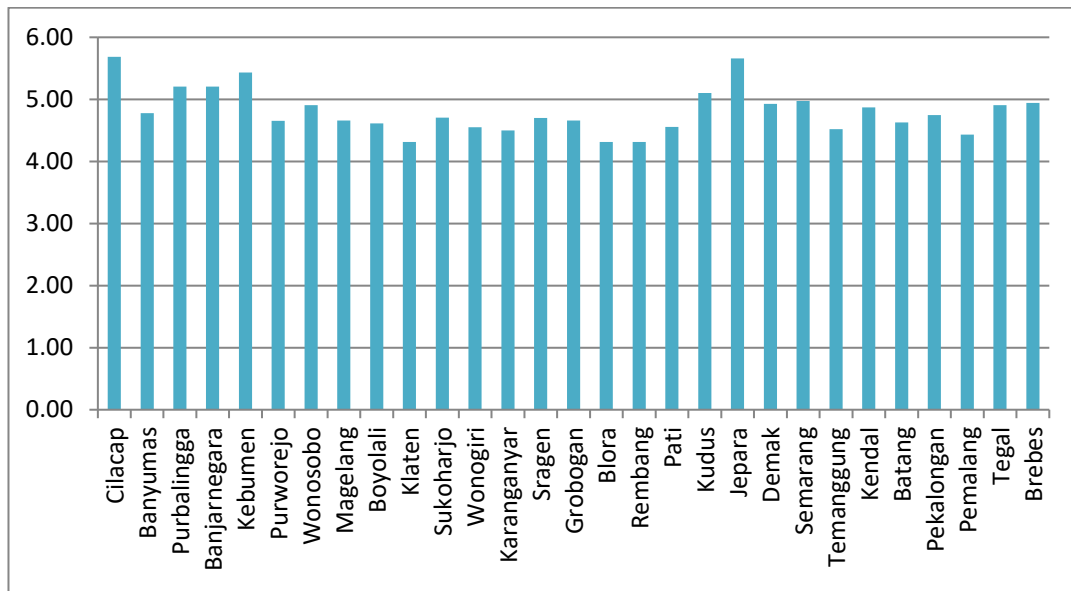
Grafik 1.2
Rata-Rata Derajat Kemandirian Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)



Sumber: Berbagai Kabupaten dalam Angka (diolah)

Dari sisi instabilitas makroekonomi yang ditunjukkan oleh inflasi, maka rata-rata tertinggi inflasi menurut kabupaten di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2011-2016 adalah kabupaten Cilacap sebesar 5,68. Sedangkan untuk nilai rata-rata inflasi terendah menurut kabupaten di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2011-2016 adalah kabupaten Blora seperti ditunjukkan dalam grafik 1.3.

Grafik 1.3
Rata-Rata Inflasi Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)



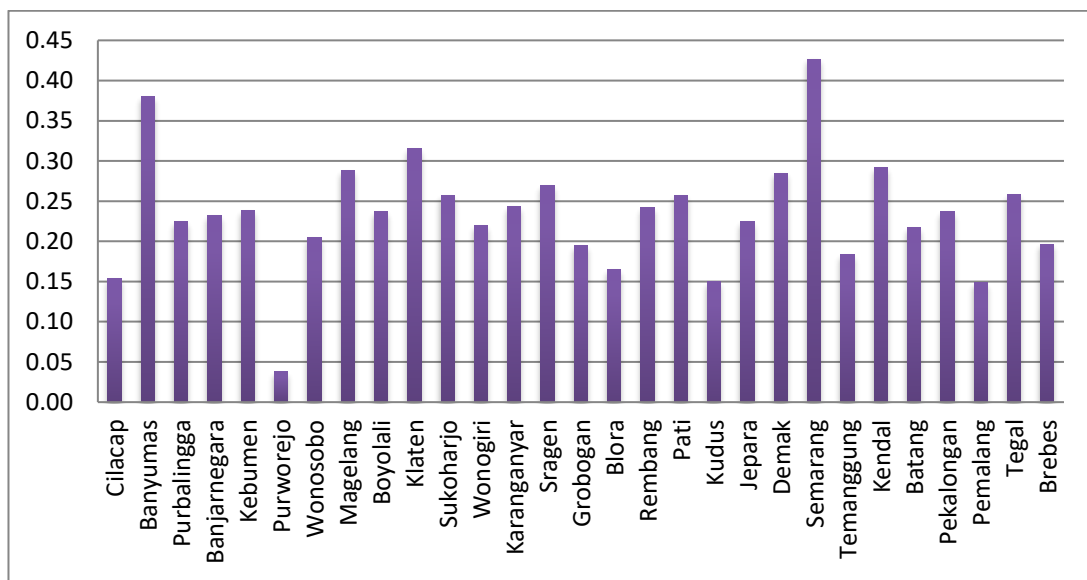
Sumber : BPS Jawa Tengah

Ada faktor-faktor lain yang diduga menyebabkan terjadinya inflasi regional, seperti penelitian Ramdhani (2015) yang memasukkan variabel keberadaan RITF (*Regional Inflation Task Force*), PDRB, inflasi makanan, besarnya populasi dan kondisi infrastruktur sebagai variabel yang akan mempengaruhi inflasi regional. Pada penelitian ini, ditambahkan beberapa variabel kontrol yang diduga mempengaruhi inflasi regional. Pengaruh variabel kontrol ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan variabel makroekonomi dari sisi *demand* tetapi juga dari sisi *supply*.

Variabel kontrol yang termasuk dalam penelitian ini salah satunya adalah investasi. Investasi pada penelitian ini dihitung melalui rasio jumlah Pembentukan

Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori terhadap PDRB tiap kabupaten. PMTB sendiri adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi yang mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB dan perubahan inventori merupakan komponen pembentuk PDRB suatu daerah berdasarkan pengeluaran.

Grafik 1.4
Rata-Rata Rasio Investasi Menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (persen)



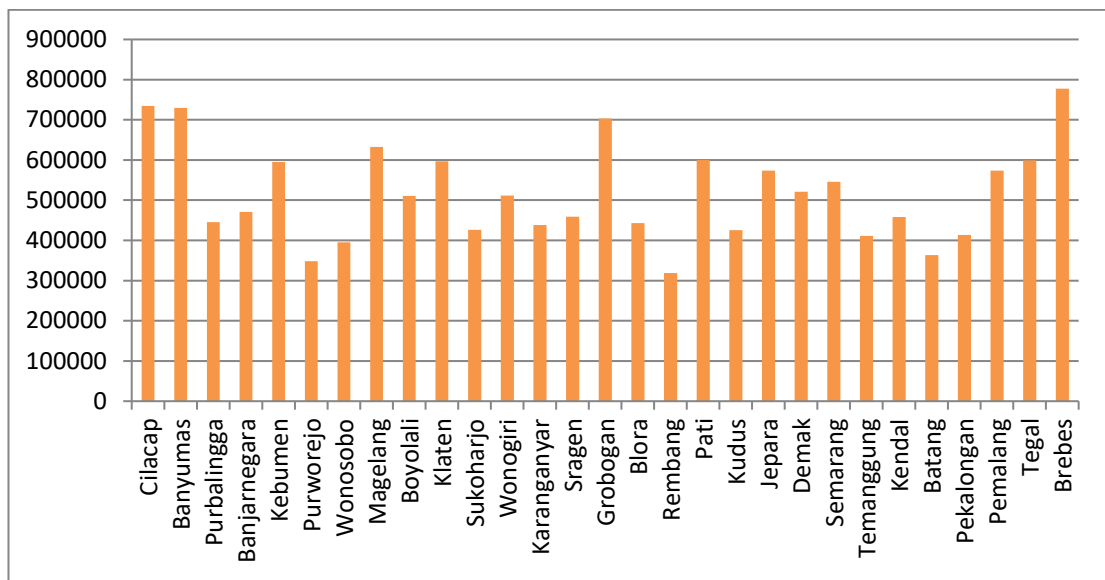
Sumber: BPS (diolah)

Pada grafik 1.4 digambarkan bahwa rata-rata rasio investasi tertinggi menurut kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2016 adalah kabupaten Semarang sebesar 0,43. Sedangkan rata-rata rasio investasi terendah menurut

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2016 adalah kabupaten Purworejo.

Selain rasio investasi, faktor lain yang diduga mempengaruhi inflasi regional pada penelitian ini adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja. Angkatan kerja yang dimaksud adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih). Angkatan kerja yang bekerja dapat mempengaruhi inflasi regional dari sisi *supply* maupun *demand*. Jumlah rata-rata tertinggi angkatan kerja yang bekerja menurut kabupaten pada tahun 2011-2016 di Provinsi Jawa Tengah adalah kabupaten Brebes sebesar 777.160 jiwa. Sedangkan jumlah rata-rata terendah angkatan kerja yang bekerja menurut kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2016 adalah kabupaten Rembang seperti yang digambarkan pada grafik 1.5.

Grafik 1.5
Rata-Rata Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (jiwa)

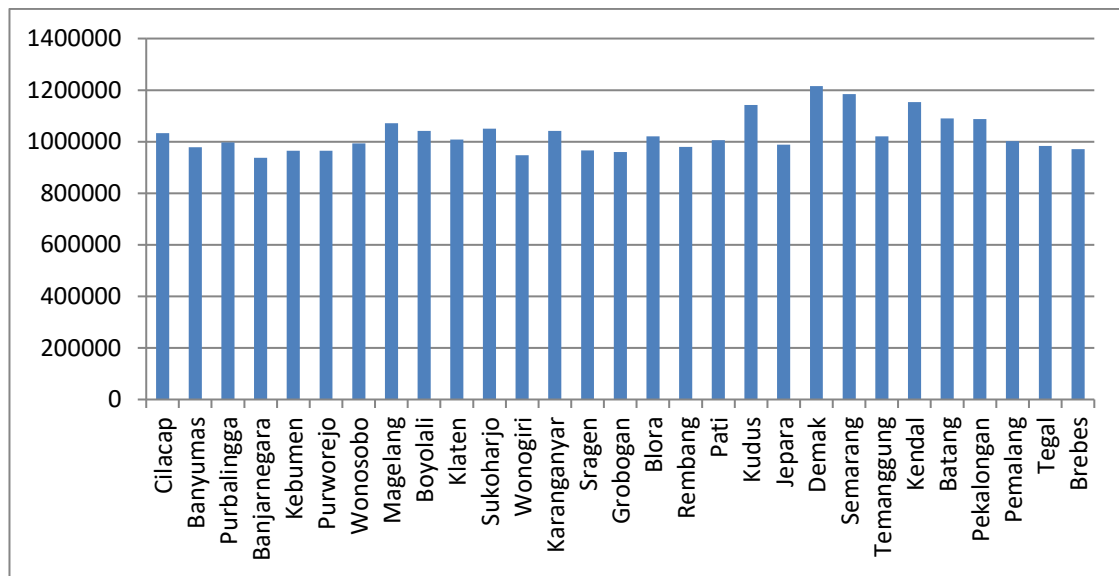


Sumber: BPS (diolah)

Berbicara tentang angkatan kerja yang bekerja tentu tidak lepas dari upah yang diterima oleh tenaga kerja tersebut. Besaran upah yang dipakai dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, penetapan upah minimum di setiap kabupaten didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum kabupaten ditetapkan oleh Gubernur yang besarnya lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya dan dilakukan peninjauan setiap satu tahun sekali. Rata-rata UMK di Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kabupatennya. Jumlah rata-rata tertinggi

upah minimum pada kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2011-2016 adalah kabupaten Demak sebesar Rp 1.215.998. Sedangkan kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten dengan jumlah upah minimum terendah sepanjang tahun 2011-2016 pada kabupaten di Jawa Tengah seperti pada grafik 1.6.

Grafik 1.6
Rata-Rata Upah Minimum Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (rupiah)



Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini akan meneliti kembali pengaruh rasio fiskal sisi pemasukan dan rasio fiskal sisi pengeluaran terhadap inflasi regional di Jawa Tengah dengan menambahkan variabel yang mempengaruhi inflasi dari sisi *supply* dan dari sisi *demand* yang belum ada dalam penelitian Ramdhani yaitu investasi, jumlah angkatan kerja yang bekerja dan UMK. Maka penelitian ini akan mengambil judul “**Analisis Derajat Desentralisasi**

Fiskal dan Derajat Kemandirian Terhadap Inflasi Regional di 29 Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2011-2016”

1.2 Rumusan Masalah

Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah sehingga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan, namun di sisi yang lain desentralisasi fiskal dapat meningkatkan terjadinya instabilitas makroekonomi yaitu, terjadinya inflasi. Desentralisasi fiskal dapat memungkinkan pemerintah daerah kabupaten di Jawa Tengah melakukan kebijakan defisit anggaran dan kebijakan utang yang dapat menjadi pemicu instabilitas makroekonomi daerah. Adanya kebebasan peminjaman oleh daerah otonom, memungkinkan pemerintah daerah memiliki kelebihan utang yang melampaui kapasitas pengembalian kewajibannya.

Rasio fiskal sisi pendapatan dapat memungkinkan pemerintah memberlakukan adanya peraturan daerah baru terkait ekstensifikasi pajak dan retribusi. Hal ini dapat menimbulkan persepsi buruk di kalangan pebisnis (investor) yang berpendapat bahwa pajak/retribusi baru daerah merupakan hambatan besar bagi pengembangan usaha dan investasi karena cenderung meningkatkan biaya produksi yang dapat meningkatkan *cost push inflation*.

Berdasarkan rasio-rasio fiskal yang ditunjukkan pada grafik 1.1 dan 1.2, beberapa kabupaten di Jawa Tengah memiliki derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian yang tinggi seperti kabupaten Banyumas. Namun demikian, kondisi instabilitas makroekonominya relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten

Cilacap. Dari kondisi tersebut, diduga inflasi regional tidak hanya disebabkan oleh tingginya derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian tetapi ada variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi regional seperti investasi, jumlah angkatan kerja yang bekerja dan upah minimum kabupaten.

Dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh rasio desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan (DDF) terhadap inflasi regional di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh rasio desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran (DK) terhadap inflasi regional di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh investasi, jumlah angkatan kerja yang bekerja dan UMK terhadap inflasi regional di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh rasio desentralisasi fiskal dari sisi pemasukan (DDF) terhadap inflasi regional di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh rasio desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran (DK) terhadap inflasi regional di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh investasi, jumlah angkatan kerja yang bekerja dan UMK terhadap inflasi regional pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Meneliti faktor-faktor non moneter yang mempengaruhi inflasi regional Jawa Tengah baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply* yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya.
2. Sebagai sumber masukan dan bahan evaluasi untuk melihat pengaruh rasio desentralisasi fiskal sisi pendapatan (DDF) dan rasio desentralisasi fiskal sisi pengeluaran (DK) terhadap inflasi regional pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebagai referensi dan bahan bacaan bagi pembaca yang dapat menambah ilmu pengetahuan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II ini terdiri dari landasan teori terkait desentralisasi fiskal dan variabel lainnya yang mendukung, hasil temuan penelitian sebelumnya, teknik analisis dan alat uji yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi penelitian, jenis dan sumber daya, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian. Hasil temuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari seluruh rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB V Penutup

Pada bab ini, disampaikan kesimpulan hasil dari penelitian serta keterbatasan penelitian dan saran yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.